

IJIN PEMUTUSAN KERJA

Ketentuan hukum PHK mengenai ijin
untuk memutuskan hubungan kerja



Keputusan Menteri Tenaga Kerja
No.150/2000

(KMTK No.150/2000)

Pasal 2 ayat (1) KMTK No.150/2000

PHK di perusahaan harus mendapat ijin dari:

- Panitia Daerah (P4D) untuk PHK perorangan
- Panitia Pusat (P4P) untuk PHK massal



Pasal 2 ayat (2) KMTK No.150/2000

Pengecualian melakukan PHK tanpa meminta izin dalam hal :

- a) Pekerja dalam masa percobaan kerja
- b) Pekerja mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa mengajukan syarat



Lanjutan.....

c) Pekerja telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama



Lanjutan....

- d) Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu
- e) Pekerja meninggal dunia

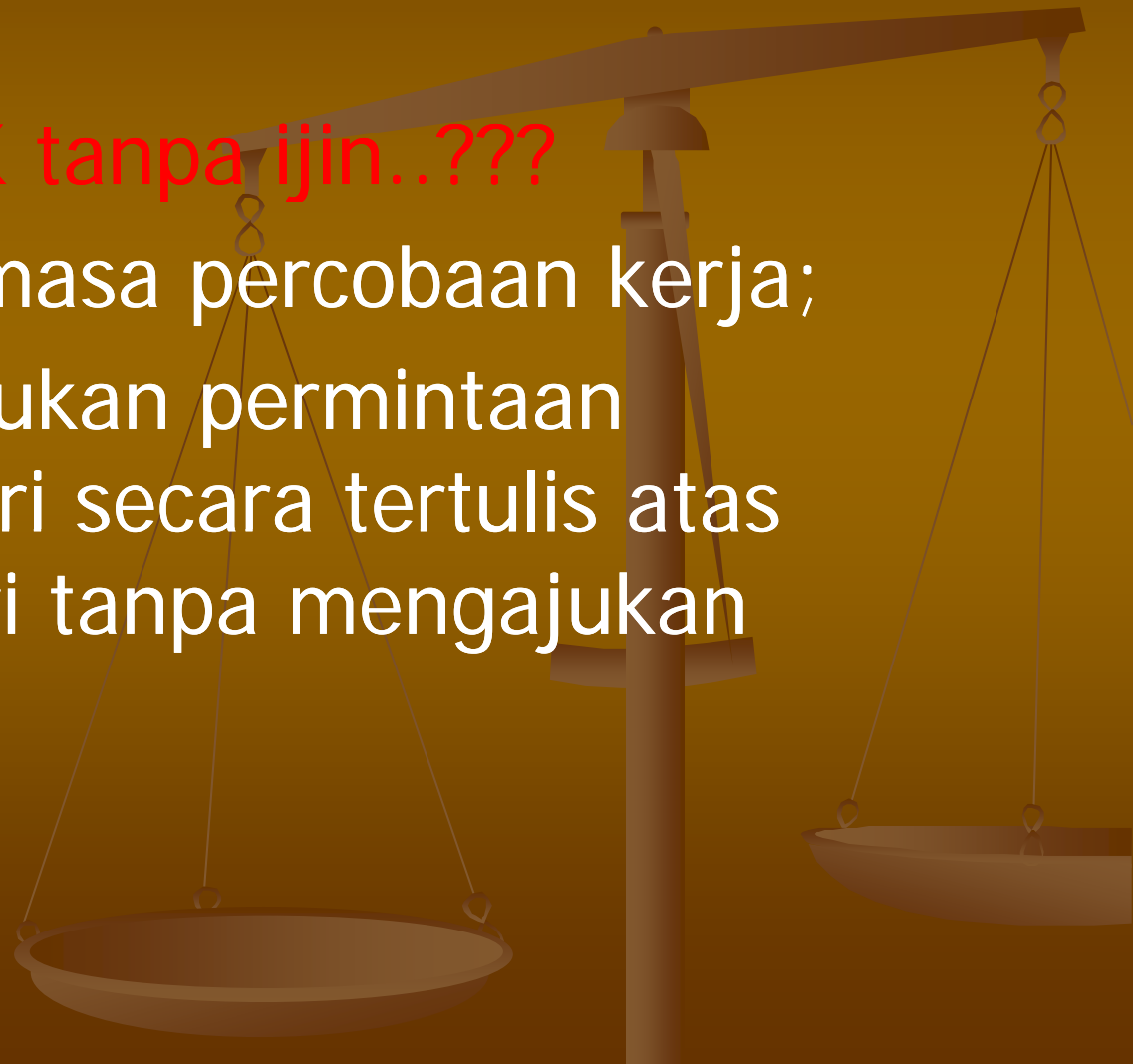


Pasal 2 ayat (2)

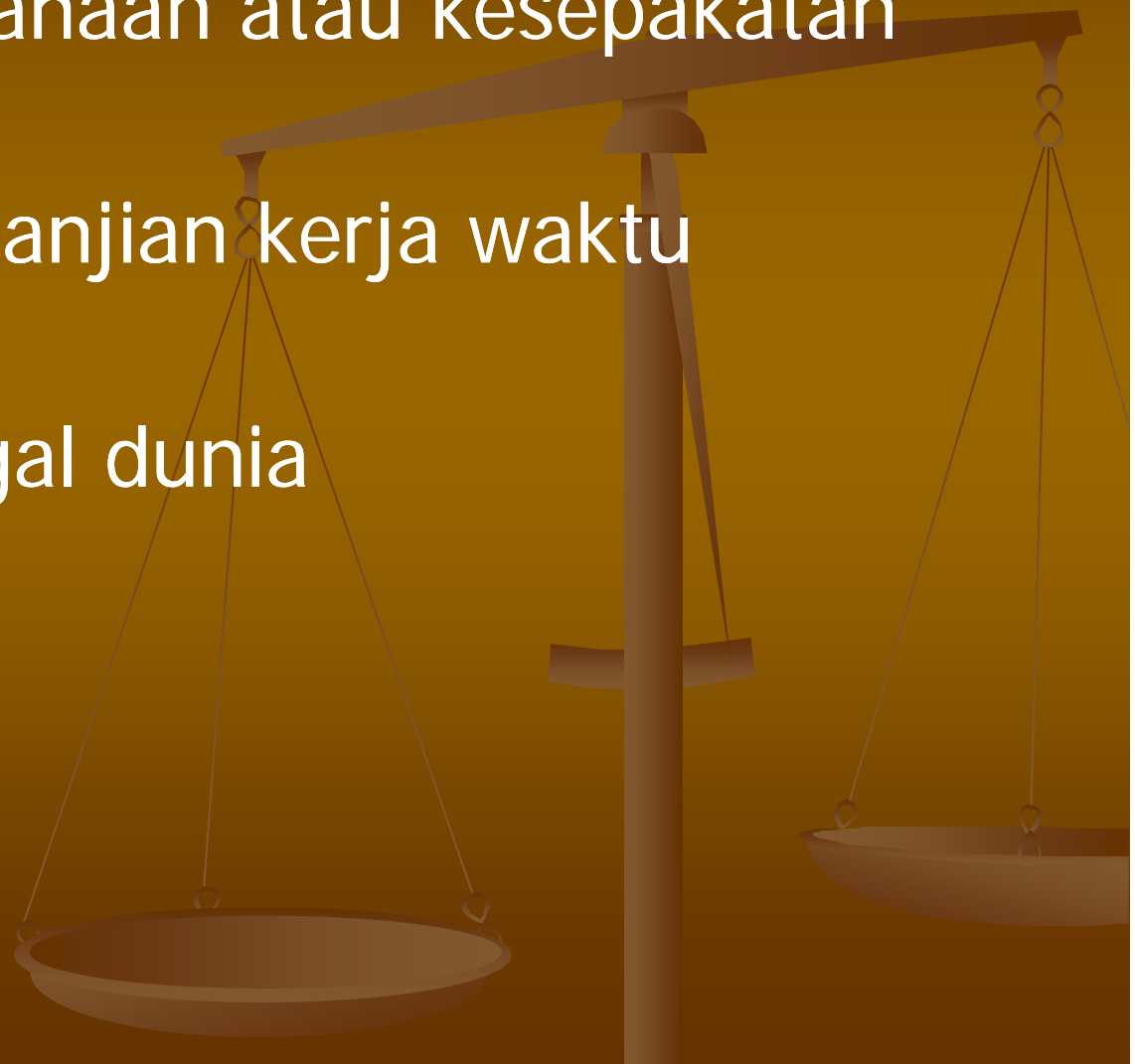
KMTK No.150/2000

Pengecualian PHK tanpa ijin..???

- Pekerja dalam masa percobaan kerja;
- Pekerja mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa mengajukan syarat;



- Pekerja telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama;
- Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu;
- Pekerja meninggal dunia



Prosedur pemutusan hubungan kerja

Pasal 16 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep-78 /Men/2001



perubahan atas beberapa pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/2000

- Sebelum ijin pemutusan hubungan kerja diberikan oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat, pengusaha dapat melakukan skorsing
- pengusaha wajib membayar upah selama skorsing paling sedikit sebesar 75% dari upah yang diterima pekerja/buruh.
- Pemberian upah selama skorsing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.